

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah dijiwai oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu tentang Pemerintah Daerah. Daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan dari pada otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Undang-Undang tersebut direvisi dan disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan direvisi yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD yang merupakan bagian dari Pendapatan Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan Total Pendapatan daerah pada APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Berlakunya produk hukum mengenai pemerintah daerah tersebut membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu : pertama, adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan *financial* untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat; kedua, bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri.

Menurut Kaho (1997 : 124) untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak hanya menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat dapat ditekan. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar. Kegiatan ini hendaknya didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai persyaratan dalam sistem pemerintahan Negara.

Undang-Undang No. 33/2004 perubahan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari daerah itu sendiri yang terdiri dari ; (1) hasil pajak daerah, (2) hasil dari retribusi daerah, (3) hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan berbagai pos pendapatan sumber dana yang tersedia diharapkan dapat menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi

pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah.

Dalam proses menuju kemandirian sebuah daerah otonomi dalam hal ini terutama dalam bidang pembiayaan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pembangunan dirasa masih kurang. Kenyataan ini tercermin dari peranan sumbangan atau kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dirasa masih rendah, khususnya untuk PAD kabupaten/kota. Permasalahan yang sama juga dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal ini peningkatan pembiayaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, untuk itu penelitian kali ini dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas utara dengan fokus penelitian tentang pengaruh Pajak, Retribusi dan pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap PAD dengan menggunakan data sekunder periode penelitian 2008-2012, sehubungan dengan hal tersebut maka ada baiknya berikut ini dipaparkan gambaran makro ekonomi mengenai kebijakan keuangan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kabupaten Padang Lawas utara Tahun Anggaran 2008. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas utara telah berupaya terus menerus meningkatkan pendapatan asli daerah dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi, efisiensi biaya pungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Lawas utara selama 5 (lima) tahun terakhir ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah.**

TAHUN	PAD (Juta Rp)	TAX (Juta Rp)	RET (Juta Rp)	OTHS (Juta Rp)	CONS (Juta Rp)	TAX <sub>t-1</sub> (Juta Rp)	PDRB (Juta Rp)	POP (Jiwa)	RET <sub>t-1</sub> (Juta Rp)
2008	165,500	1,400	6,500	150	414,560	1,400	692,420	193,278	6,500
2009	278,200	1,900	6,700	200	450,700	1,400	734,280	194,774	6,500
2010	338,920	1,860	6,840	360	489,650	1,900	783,760	223,531	6,700
2011	397,450	6,130	6,280	2,680	489,480	1,860	837,150	225,621	6,840
2012	564,320	6,000	4,990	3,680	528,030	6,130	890,590	229,064	6,280

Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2009-2013

Tabel 1.1 Menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah tahun 2008-2012 dari pajak daerah di tahun 2008 sebesar 1,400 juta, mengalami peningkatan di tahun 2009 sebesar 1,900 juta, kemudian mengalami penurunan di tahun 2010 sebesar 1,860 juta, kemudian di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 6,13 miliar, dan di tahun 2012 kembali mengalami penurunan sebesar 6,000 juta, retribusi daerah di tahun 2008 sebesar 6,500 juta, mengalami peningkatan di tahun 2009 sebesar 6,700 juta, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2010 sebesar 6,840 juta, kemudian di tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 6,280 juta, juga pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 4,990 juta, lain-lain PD yang sah di tahun 2008 sebesar 0,150 juta, mengalami peningkatan di tahun 2009 sebesar 200 juta, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2010 sebesar 360 juta, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2011 sebesar 2,680 juta, kemudian

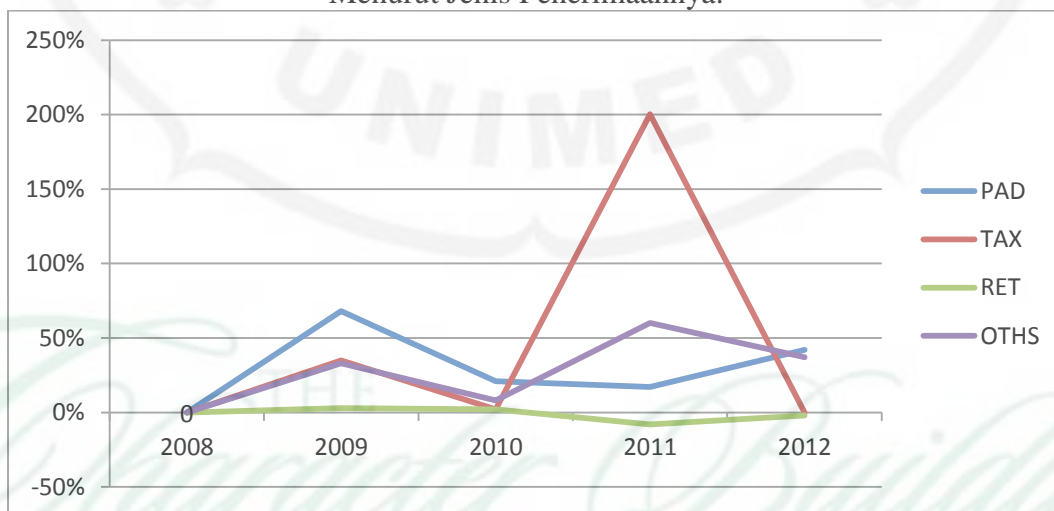
mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar 3,680 juta. Bahwa selama periode 5 (Lima) tahun, anggaran Kabupaten Padang Lawas utara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah cenderung meningkat.

**Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Daerah.**

Tahun	PAD	TAX	RET	OTHS
2008	-	-	-	-
2009	68%	35%	3%	33%
2010	21%	2%	2%	8%
2011	17%	200%	-8%	60%
2012	42%	-0,2%	-2%%	37%

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Jenis Penerimaannya.



**Grafik 1.1 Realisasi Penerimaan Daerah**

Grafik 1.1 Menjelaskan grafik peningkatan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Jenis Penerimaannya 2008-2012. PAD di tahun 2008 hingga 2009 mengalami peningkatan sebesar 68,00%, di tahun 2010

juga mengalami peningkatan sebesar 21,00%, ditahun 2011 meningkat 17,00%, ditahun 2012 meningkat 42,00%, pajak di tahun 2008 hingga 2009 mengalami peningkatan sebesar 35,00%, di tahun 2010 juga mengalami peningkatan sebesar 2,00%, ditahun 2011 mengalami peningkatan 200,00%, ditahun 2012 mengalami penurunan sebesar -0,20%, retribusi tahun 2008 hingga 2009 mengalami peningkatan sebesar 3,00%, ditahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 2,00%, ditahun 2011 mengalami penurunan sebesar -8,00%, ditahun 2012 juga mengalami penurunan sebesar -2,00%, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah di tahun 2008 hingga 2009 mengalami peningkatan sebesar 33,00%, di tahun 2010 juga mengalami peningkatan sebesar 8,00%, ditahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 60,00%, ditahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 37,00%. Di setiap tahunnya penerimaan pemerintah menurut jenisnya terus mengalami peningkatan, namun peningkatannya tiap tahunnya bervariasi.

Peningkatan pendapatan asli daerah ini akibat dari perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Padang Lawas utara yang berkembang pesat. Ini dikarenakan semakin tingginya pendapatan perkapita masyarakat, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dimana ini memberikan kontribusi kepada pajak dan retribusi.

Kemudian jika dilihat dari pengeluaran penduduk terbesar adalah untuk pengeluaran makanan. pada tahun 2011, pengeluaran penduduk untuk makanan mencapai 67,52 persen, sedangkan sisanya 32,48 persen untuk non makanan 14 persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan tahun 2011 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan persentase 0-150.000 0,48%

150.000-199.999 0,87% 200.000-299.999 20,24% 300.000-399.999 22,06%  
 400.000-499.999 21,49% 500.000 34,87% sumber : padang lawas utara dalam  
 angka, 2012 perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur  
 melalui perkembangan tingkat pendapatan.

Pada tahun 2011 sebagian besar penduduk kabupaten padang lawas utara  
 berada pada golongan pengeluaran lebih dari rp 500.000,- per kapita tiap  
 bulannya. terdapat 34.87 persen penduduk kabupaten padang lawas utara yang  
 pengeluaran perkapita tiap bulannya di atas rp 500.000,-. tingkat kesejahteraan  
 juga dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara pengeluaran yang dialokasikan  
 untuk makanan dan non-makanan. semakin tinggi persentase pengeluaran non-  
 makanan dibanding total pengeluaran, mengindikasikan adanya tingkat  
 kesejahteraan yang lebih baik. pada tahun 2011 persentase pengeluaran rata-rata  
 untuk makanan (67,52 persen) masih jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran  
 untuk non-makanan (32,48 persen).

Kabupaten padang lawas utara 2012 dengan luas lahan tanaman sebesar  
 27.995,33 ha, menghasilkan produksi kelapa sawit sebesar 23.531,8 ribu ton pada  
 tahun 2011 9, 2011 padi sawah luas panen (ha) 24.568 13.947 produksi (ton)  
 147.408,00 65.156,45 jagungn luas panen (ha) 676 438 produksi (ton) 3.025,00  
 1.679,81 ubi kayu luas panen (ha) 265 204 produksi (ton) 2.385,00 2.797,65  
 ubi jalar luas panen (ha) 61 62 produksi (ton) 427,00 555,36 kedelai luas panen  
 (ha) 136 208 produksi (ton) 204,00 251,13 kacang tanah luas panen (ha) 124 123  
 produksi (ton) 223,20 156,69 kacang hijau luas panen (ha) 246 102 produksi (ton)  
 295,20 123,30 sumber : padang lawas utara dalam angka, 2012 subsektor



perkebunan adalah subsektor dengan kontribusi terbesar pada pdrb kabupaten padang lawas utara pada tahun 2011 tidak jauh dari kabupaten induknya (kabupaten tapanuli selatan), mayoritas penduduk kabupaten padang lawas utara menekuni kegiatan ekonomi di bidang pertanian. kegiatan pertanian yang banyak ditekuni penduduknya adalah menanam tanaman bahan makanan seperti padi. produksi padi di kabupaten padang lawas utara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. produksi padi sawah sebesar 147,41 ribu ton pada tahun 2010 turun menjadi 65,16 ribu ton pada tahun 2011. produktivitas padi sawah di kabupaten padang lawas utara pada tahun 2010 produktivitas padi mencapai 6 kwintal/ha sedangkan pada tahun 2011 mencapai 41,04 kwintal/ha. beberapa tanaman pangan di kabupaten padang lawas utara mengalami kenaikan produktivitas bila dibandingkan dengan tahun 2010. ubi kayu mengalami kenaikan produktivitas yang cukup tinggi. pada tahun 2011 produktivitas ubi kayu mencapai 137,14 kuintal/ha meningkat pesat bila dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 90 kuintal/ha.

Kemudian jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2010-2012 terjadi peningkatan sebesar 1,18% dari periode tahun sebelumnya 2000-2010, peningkatan ini terjadi di setiap kecamatan di kabupaten padang lawas utara.

Tabel 1.3  
Data kependudukan kabupaten Padang Lawas Utara

Kecamatan	Jumlah Penduduk <i>Number Of Population</i> (orang / persons)			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	
	2000	2010	2012	2000-2012	2010-2012
Batang Onang	11.550	12.790	13.065	1,02	1,03
Padang Bolak Julu	9.478	9.972	10.165	0,51	0,92
Portibi	20.711	23.228	23.72	1,15	1,04
Padang Bolak	48.498	58.560	60.058	1,90	1,22
Simangambat	17.552	46.769	48.043	10,32	1,30
Halongonan	21.741	29.058	29.807	2,94	1,23
Dolok	20.143	22.573	23.093	1,15	1,10
Dolok Sigompulan	12.850	15.898	16.294	2,15	1,19
Hulu Sihapas	3.401	4.68	4.807	3,25	1,26
Kab.Padang Lawas Utara	165.895	223.531	229.064	3,03	1,18

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara 2013

Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah sendiri (Provinsi/Kabupaten) dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa faktor-faktor “Yang dapat dikendalikan” (yaitu faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan), dan “yang tidak dapat dikendalikan”, (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah, Beberapa faktor-faktor tersebut adalah : (1) Kondisi awal suatu daerah, (2) Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, (3) Perkembangan PDRB perkapita riil, (4) Pertumbuhan penduduk, (5) Tingkat

inflasi, (6) Penyesuaian tarif, (7) Pembangunan baru, (8) Sumber pendapatan baru, (9) Perubahan peraturan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan murni daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Semua pendapatan daerah itu mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah yang merupakan salah satu tolak ukur di dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional.

Pada hakikatnya retribusi daerah lebih beraneka ragam dan bervariasi antara daerah yang satu dengan yang lain. Semakin maju suatu daerah akan semakin banyak fasilitas atau jasa yang perlu disediakan untuk pemenuhan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga semakin banyak pula jasa-jasa retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.

Untuk menilai sejauh mana pembangunan bidang ekonomi yang telah dilaksanakan maka sangat diperlukan adanya alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan tersebut. Pendapatan regional adalah suatu indikator berupa data agregat yang sampai saat ini banyak negara termasuk Indonesia masih memakai data tersebut untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun regional. PDRB merupakan data statistik untuk memberikan gambaran-gambaran keadaan ekonomi baik di masa lalu maupun sekarang dan sebagai evaluasi, perencanaan, dan sasaran yang akan dicapai masa mendatang.

Produk domestik adalah seluruh produk barang dan jasa serta hasil kegiatan ekonomi yang diproduksi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut. Maksud wilayah domestik suatu *region* adalah meliputi wilayah yang berada di dalam batas geografis region tersebut seperti propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa. Sedangkan produk regional adalah merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu region.

Data PDRB ini diperlukan untuk mengetahui : (a) Pertumbuhan ekonomi regional maupun sektoral, laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi; (b) Tingkat kemakmuran suatu daerah, tinggi rendahnya tingkat kemakmuran suatu daerah biasanya diukur dengan besar kecilnya angka pendapatan per kapita. Angka ini diperoleh dan pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun; (c) Tingkat perubahan harga secara keseluruhan (inflasi/deflasi), inflasi atau deflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga. Jika terjadi fluktuasi harga yang tidak menentu akan sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Terjadinya kenaikan harga terus-menerus menurunkan daya beli konsumen, sebaliknya terjadinya deflasi terus-menerus menimbulkan resesi ekonomi. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan. Penyajian atas dasar harga konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga konstan yang terjadi. Karena menggunakan harga konstan maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun dinilai berdasarkan harga tahunan.

Penerimaan daerah perlu terus diupayakan dengan peningkatan adanya penggalan potensi sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya. Upaya perbaikan sangat diperlukan terutama di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah diarahkan agar daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membiayai penyelenggaraan urusannya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan diberikannya kewenangan oleh pemerintah pusat berupa kewenangan yang kuat, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Untuk mempercepat tercapainya kemandirian khususnya perusahaan-perusahaan swasta diharapkan kontribusinya dalam sumber lain-lain PAD yang sah.

Namun demikian pemerintah daerah harus ikut dalam hal membuka pangsa pasar domestik dan internasional. Dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi produk yang dihasilkan maka pangsa pasar akan lebih luas dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD.

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Alasannya sederhana, karena penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar pelaksanaan hasil-hasil perencanaan dapat berjalan dengan baik. Penduduk juga merupakan motor penggerak pembangunan, juga dapat bertindak sebagai obyek, dimana ia akan menjadi salah target dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, analisis

kependudukan sangat mendukung efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan agar berhasil sebagaimana diharapkan. Hal ini sesuai dengan teori (Wihana Kirana : 2002) yang menyatakan bahwa besarnya pendapatan dipengaruhi langsung oleh jumlah penduduk. Bila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang akan ditarik meningkat.

Berdasarkan teori klasik dikemukakan suatu teori yang menjelaskan kaitan antara pendapatan per kapita dengan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimal. Dari teori pertumbuhan klasik telah dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita, maka penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita, akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi. Oleh karenanya pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Penduduk yang bertambah terus akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marginalnya telah sama dengan pendapatan perkapita. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai maksimal. (Sadono Sukirno, 1999 : 431).

Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk meneliti dan lebih mencermati bagaimana pengaruh Pajak, Retribusi, Dan Pendapatan Asli Lain Yang Sah Terhadap PAD Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2008-2012.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh pajak, retribusi, dan pendapatan asli lain yang sah terhadap PAD di kabupaten Padang Lawas utara tahun 2008-2012?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini berguna untuk

1. Mengetahui Pengaruh Pajak, Retribusi, Dan Pendapatan Asli Lain Yang Sah Terhadap PAD Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2008-2012.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai referensi dalam mengembangkan metodologi penelitian lebih lanjut tentang PAD.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Asli Lain Yang Sah terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Merupakan bahan evaluasi dan masukan untuk selanjutnya dapat menentukan arah kebijakan dalam perencanaan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.